

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembagian kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, merupakan makna dari desentralisasi yang berakibat kepada adanya penyerahan kewenangan, pemerintah daerah, dan daerah otonom. Konsep desentralisasi ini juga dapat juga dikatakan berhubungan dengan konsep transfer kekuasaan dan kewenangan dari level pemerintahan yang tinggi kepada yang lebih rendah dalam suatu sistem pemerintahan (Abdullah, 2005:65). Pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan yang ada pada pemerintahan daerah dan demi kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau disebut juga sebagai otonomi daerah. Pembagian kekuasaan ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya sendiri. Peraturan mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015.

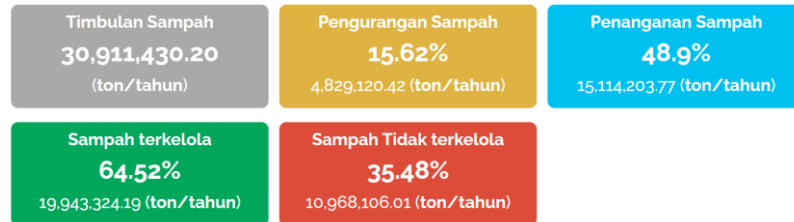
Urusan pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 11 Ayat (1) bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang harus diselenggarakan oleh semua daerah di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Lingkungan Hidup.

Persampahan merupakan salah satu urusan bidang lingkungan hidup yang permasalahannya semakin kompleks, seiring dengan peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa “Persoalan sampah di Indonesia belum selesai, bahkan cenderung makin kompleks dengan *magnitude* yang semakin besar. . .” (Astro, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan sampah menjadi salah satu permasalahan nasional yang harus segera diatasi, menimbang peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, dapat membuat timbulan sampah menjadi meningkat juga.

Oleh karena itu jumlah penduduk serta beragamnya aktivitas yang ada pada kota besar secara terkhusus membuat pengelolaan sampah menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Pengelolaan sampah yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, hingga bencana alam banjir. Penelitian terkait pengaruh sampah dan limbah terhadap pencemaran lingkungan juga sudah dilakukan, dan menunjukan bahwa pengelolaan sampah yang buruk dapat menyebabkan pencemaran lingkungan (Nggadi, Hikmah, & Messakh, 2022: 47).

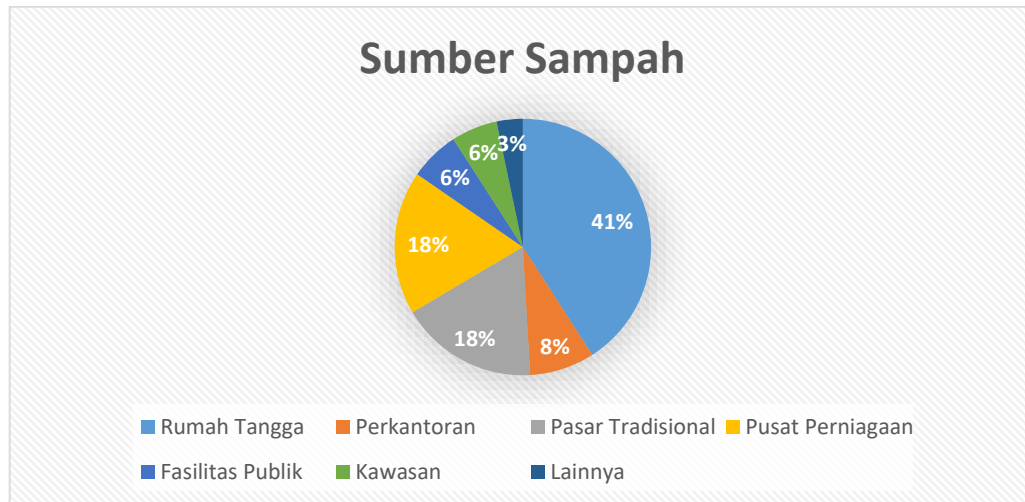
Gambar 1. 1 Data Sampah Nasional



Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses pada 13 maret 2023

Pengelolaan sampah di Indonesia masih terbilang buruk, berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mengenai pengelolaan sampah pada Gambar 1.1 tahun 2021, sampah yang tidak terkelola sejumlah 10,968,106.01 ton/tahun atau 35.48% dari timbunan sampah sebesar 30,911,430.20 ton/tahun. Jumlah tersebut sangat buruk jika dibandingkan dengan jumlah pengurangan sampah yang kurang dari 50% jumlah sampah yang tidak terkelola. Bahkan jumlah timbunan sampah pada tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 jumlah timbunan sampah 27,592,603 ton/tahun (KLHK, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pada sampah nasional peningkatan jumlah timbunan sampah juga terjadi mencapai 3,318,827 ton/tahun.

Gambar 1. 2 Sumber Sampah Nasional



Sumber : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses pada 13 maret 2023

Sementara itu, penyumbang sampah terbesar dalam skala nasional berasal dari sampah rumah tangga, dengan total 41% dari jumlah timbulan sampah. Penanganan sampah yang kurang baik dapat menciptakan lingkungan yang buruk bagi kesehatan, tumpukan sampah dapat menjadi tempat bagi tikus, serangga, dan bakteri yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Dampak dari penanganan sampah yang kurang baik ini dapat dirasakan oleh masyarakat kota kecil, maupun kota besar dengan jumlah penduduk dan aktivitas penduduk yang tinggi.

Kota Bekasi menjadi salah satu Kota Metropolitan di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk per semester 1 Tahun 2021, sebanyak 2,468,251 juta jiwa (Disdukcapil Kota Bekasi, 2021). Pada tahun 2021, Kota Bekasi menjadi penyumbang sampah urutan pertama, dengan jumlah sampah mencapai 2.375 Ton per harinya (Kementerian Lingkungan Hidup, 2021). Dengan jumlah penduduk yang mencapai hampir 2,5 Juta Jiwa, pengelolaan sampah yang tepat efektif dan efisien menjadi

penting, mengingat pengelolaan sampah yang buruk dapat berdampak buruk juga bagi kota tersebut. Pengelolaan sampah di Kota Bekasi merupakan salah satu Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Dalam pengelolaan sampah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas salah satunya pelaksanaan urusan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3.

Pengelolaan sampah pada umumnya di perkotaan dilakukan dengan cara pengambilan langsung sampah pada tempat Penampungan Sementara (TPS), lalu kemudian diangkut oleh truk sampah menuju ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk diolah hingga sampah dapat aman untuk dikembalikan ke media lingkungan, dan terakhir diangkut oleh truk menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah dengan cara tersebut juga diterapkan oleh pemerintah kota Bekasi, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Sementara itu terkait dengan regulasi yang mengatur pengelolaan sampah, pemerintah kota Bekasi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bekasi. Perda tentang pengelolaan sampah pada kota Bekasi tersebut mengalami perubahan sebanyak dua kali, melalui Perda Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2017 dan Perda Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021. Perubahan sebanyak dua kali tersebut, mengubah berbagai pasal termasuk didalamnya terkait instansi yang berwenang dalam pengelolaan sampah, bentuk kerja sama dalam pengelolaan sampah, hingga jenis-jenis sampah yang dapat diolah.

Kota Bekasi dalam mengelola sampah menggunakan TPST Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu. Salah satu masalah yang muncul pada pengelolaan sampah di Kota Bekasi, terkait dengan kapasitas TPA Sumur Batu yang tidak bertambah, sementara sampah semakin hari terus meningkat sehingga pengelolaan sampah belum maksimal. Terkait dengan pengembangan kapasitas TPA Sumur Batu, telah diatur di dalam Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 Pasal 14 ayat (4), bahwa pengembangan pengelolaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sumur Batu pada poin pertama yaitu peningkatan kapasitas sarana dan prasarana di TPPAS Sumur Batu. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Yayan Yuliana, mengatakan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sumur Batu sudah melebihi kapasitas, dari kurang lebih 1.800 Ton per hari sampah yang diangkut, hanya 70 Persen sampah yang dapat ditampung (Fadlurrohman, 2022).

Meningkatnya jumlah sampah di TPA Sumur Batu ini juga salah satu akibat dari meningkatnya jumlah sampah di Kota Jakarta, yang mana Kota Bekasi merupakan kota penyangga Jakarta dalam hal pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pemanfaatan lahan TPST Bantar Gebang hingga 2026. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023) menyampaikan bahwa Volume Sampah yang Terangkut per Hari pada tahun 2021 mencapai 7.233 Ton dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 7.543 Ton, yang kemudian sampah tersebut dikelola secara berkala untuk

kemudian diolah di TPST Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu. Perlu diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perjanjiannya dengan Pemerintah Kota Bekasi akan memberikan *tipping fee* sebesar Rp 379 miliar setiap tahun dari Pemprov DKI Jakarta, namun yang menjadi permasalahan adalah *tipping fee* sebesar Rp 379 miliar tersebut belum dapat mengatasi permasalahan overload TPA Sumur Batu Kota Bekasi. Hal ini perlu menjadi perhatian lebih mengingat permasalahan ini bukan hanya berdampak kepada estetika kota, namun lebih kepada dampak lingkungan yang buruk dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan pengelolaan sampah pada TPA Sumur Batu penting untuk diteliti, sehingga permasalahan yang ada dapat terselesaikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk membahas permasalahan tersebut yang terangkum dalam rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu Kota Bekasi ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan TPA Sumur Batu Kota Bekasi yang sudah melebihi kapasitas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, penulis merangkum tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu Kota Bekasi.
2. Untuk memberikan rekomendasi upaya penyelesaian permasalahan TPA Sumur Batu Kota Bekasi yang sudah melebihi kapasitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta menambah pemahaman dan wawasan bagi akademisi. Terutama pihak-pihak yang ingin memahami bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi terhadap pengelolaan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir Sumur Batu Kota Bekasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk dapat menjadi masukan dan informasi, dalam upaya meningkatkan kinerja dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi terkhusus Tempat Pemrosesan Akhir Sumur Batu Kota Bekasi.

1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Daftar Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti / Tahun	Judul	Teori	Metode	Hasil Penelitian
1	Rian dan Arlina / 2021	Evaluasi Efektifitas Sistem Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah di TPA Sarimukti Kota Bandung	Teori Evaluasi dan Teori Efektifitas	Metode Penelitian Analisis Statistik Deskriptif	Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan sampah di TPA Sarimukti Kota Bandung belum dengan baik dikelola, masih memerlukan efisiensi dalam pengolahan sampah sehingga dampak buruk pada lingkungan dapat berkurang. Perlu dilakukan pengorganisasian ulang sehingga sistem pengolahan lebih rapih dan teratur.
2	Agung / 2016	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban	Teori Evaluasi	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Pemilihan sistem controlled landfill dalam pengelolaan TPA Gunung Panggung masih belum memenuhi kriteria ketepatan kebijakan publik dengan mengacu kepada UU No 18 Tahun

NO	Peneliti / Tahun	Judul	Teori	Metode	Hasil Penelitian
					2008. Kurangnya SDM pengelola TPA Gunung Panggung, Terbatasnya jumlah anggaran, cakupan pelayanan yang kurang, dan Rendahnya kesadaran masyarakat.
3	Intan dan Pramanti / 2020	Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang	Teori Efektifitas	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Jatibarang sudah cukup baik dengan fasilitas-fasilitas penunjang seperti saluran drainase, instalasi pengumpul dan pengolahan air lindi yang berupa kolam lindi, pos kontrol operasional, pengontrol gas metana berupa pipa, dan alat berat yang digunakan untuk mengangkut sampah. pengolahan sampah juga dapat dimanfaatkan oleh

NO	Peneliti / Tahun	Judul	Teori	Metode	Hasil Penelitian
					masyarakat seperti pupuk, gas metana untuk memasak, dan adanya kantin gas metana yang pembayarannya dengan menggunakan sampah plastik.
4	Annisa Suciati / 2017	Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No. 15 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Bekasi terhadap TPA Sumur Batu)	Teori Faktor-Faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan menurut pandangan George C. Edward. Teori partisipasi masyarakat menurut pandangan Eriscon	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah di Kota Bekasi belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Dikarenakan 5 alasan kuat yaitu : 1. Pada pembuangan aktif yaitu zona 5 masih menggunakan sistem open dumping dan control landill 2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

NO	Peneliti / Tahun	Judul	Teori	Metode	Hasil Penelitian
					kurang melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat 3. Belum berjalannya Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 4. Kurang partisipasi masyarakat 5. Kurangnya zona pembuangan, sehingga sampah menumpuk di TPA sumur batu Kota Bekasi.
5	Arlina dan Enri / 2019	Kajian Evaluasi TPA dan Analisis Biaya Manfaat Sistem Pengelolaan Sampah Di TPA (Studi Kasus TPA Bakung Kota Bandar Lampung)	Teori ARRPE (Asian Regional Research Programme on Environmental Technology) dan Cost Benefit Analysis (CBA)	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPA harus direhabilitasi menjadi TPA yang berkelanjutan menurut Teori ARRPE, harus dilakukan rehabilitasi pada drainase, dan dilakukan pengembangan

NO	Peneliti / Tahun	Judul	Teori	Metode	Hasil Penelitian
					pada Blok sel D menjadi TPA berkelanjutan.

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi, terletak pada fokus penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu berfokus kepada analisis dampak lingkungan. Seperti fokus penelitian Arlina & Enri yang meneliti TPA dengan menggunakan Teori ARRPET dan Cost Benefit Analysis. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa TPA harus direhabilitasi menjadi TPA yang berkelanjutan, selain itu juga perlu dilakukan rehabilitasi pada drainase dan melakukan pengembangan pada TPA Blok sel D menjadi TPA berkelanjutan. Sementara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus kepada implementasi kebijakan Pemerintah Kota Bekasi terhadap pengelolaan sampah Di TPA Sumur Batu yang sudah *Overload*.

Namun dengan begitu, penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa permasalahan terkait pengelolaan sampah di TPA berbagai daerah masih ditemui setiap tahunnya. Terkhusus pada Kota Bekasi, masih ditemui permasalahan pengelolaan sampah yaitu kapasitas TPA Sumur Batu yang sudah *Overload* atau melebihi kapasitas. Sehingga

penelitian ini penting untuk dilakukan, agar permasalahan terkait pengelolaan sampah yang ada di TPA dapat teratasi terkhusus TPA Sumur Batu Kota Bekasi.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat dipahami sebagai sebuah tindakan dari adanya rencana yang sudah disusun melalui perencanaan yang baik. Selanjutnya, implementasi dilakukan setelah sebuah perencanaan sudah ditetapkan, kaitannya dengan sebuah kebijakan, implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan nyata dari kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Dengan begitu, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai sebuah jembatan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Tugas utama dari adanya implementasi kebijakan menurut Grindle dalam (Handoyo, 2012:95), merupakan membangun jaringan yang memungkinkan sebuah kebijakan publik dapat terealisasi dengan baik melalui aktivitas instansi pemerintah dengan melibatkan berbagai pemegang kepentingan.

Lebih lanjut Webster dalam (Tachjan, 2006:23-24) memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya implementasi dirumuskan untuk menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu, yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan implementasi melibatkan masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dalam suatu implementasi kebijakan.

Teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini berfokus kepada teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yang melihat bahwa keberlangsungan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang sangat penting yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti akan menggunakan keempat variabel tersebut sebagai rujukan dalam meneliti keberlangsungan implementasi kebijakan pengelolaan sampah Kota Bekasi. Subarsono dalam bukunya memaparkan beberapa teori implementasi kebijakan dari berbagai ahli, salah satu teori implementasi kebijakan yang ada, teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam (Subarsono, 2008:90-92). George mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

a. Komunikasi

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan mengharuskan pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan, serta bagaimana mentransmisikan kebijakan kepada kelompok sasaran kebijakan agar mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumber Daya

Untuk menjamin implementasi kebijakan berjalan dengan baik, maka sumber daya yang diperlukan harus dipenuhi. Apabila sumber daya tidak dipenuhi atau kekurangan sumber daya, maka implementasi tidak dapat berjalan efektif. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansial

c. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana kebijakan tersebut dapat melaksanakan kebijakan sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sehingga disposisi dalam hal ini menekankan, sikap atau cara pandang antara pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan agar tidak berbeda dalam melihat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Kejelasan dalam pembagian unit kerja harus jelas, pelaksanaan fungsi-fungsi dan kegiatan dalam melaksanakan kebijakan harus diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan baik. Struktur organisasi yang panjang dapat menimbulkan birokrasi yang rumit juga, sehingga menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Pada struktur organisasi yang harus menjadi perhatian lebih adalah bagaimana pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dijalankan dengan baik.

Pada implementasi kebijakan sering juga ditemukan pemerintah tidak efektif dalam melaksanakan kebijakan yang ada, pemerintah lebih hanya sekedar mengesahkan kebijakan namun belum mampu memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat membawa dampak yang berarti bagi kepentingan umum atau masyarakat. Hal tersebut dijelaskan sebagai *implementation gap*, istilah yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan akan selalu ada kemungkinan terjadi perbedaan diantara apa yang diharapkan dengan apa yang ingin dicapai. Semakin banyak perbedaan yang ada antara harapan dan kenyataan bergantung kepada yang dinamakan *implementation capacity* dari sebuah organisasi dalam hal ini pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen formal kebijakan tercapai (Abdoellah & Rusfiana, 2016:58-59).

Kualitas kebijakan menurut Hesel dalam Abdoellah (Abdoellah & Rusfiana, 2016:60) sehingga layak untuk dilaksanakan mengandung beberapa elemen di dalamnya sebagai berikut :

- a. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang ingin dipakai untuk dapat mengadakan kebijakan itu, yang kemudian berdasarkan kepada :
 - Rasional, dapat diterima akal sehat, sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang tersedia.
 - Diinginkan (*desirable*), tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan umum, sehingga mendapat dukungan dari berbagai pihak.

- b. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realitas dan valid.
- c. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan akurat, kebijakan yang tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar sudah out of date.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Penjelasan dari teori mengenai implementasi kebijakan oleh George C. Edward III digunakan untuk dapat memahami bagaimana implementasi kebijakan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dimana penelitian ini akan berfokus kepada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka definisi konsep dari masing – masing variabel sebagai berikut :

A. Implementasi Kebijakan

Bentuk pelaksanaan kebijakan berdasarkan kepada kebijakan yang telah ada, yang mana pelaksanaan kebijakan tersebut melibatkan berbagai aktor atau pemegang kepentingan di dalamnya yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Konsep implelementasi kebijakan juga terkait dengan dampak dari adanya implementasi kebijakan tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatif dari adanya kebijakan tersebut. Serta implementasi kebijakan berdasarkan teori George C. Edward III yang dapat dipahami sebagai berikut :

1. Komunikasi, memastikan bahwa komunikasi antar aktor yang terlibat selaras dengan fokus kepada tujuan dan sasaran kebijakan pengelolaan sampah yang ada, sehingga kebijakan yang ingin diimplementasikan dapat berjalan dengan baik.
2. Sumber Daya, sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan harus terpenuhi, meliputi sumber daya manusia (tenaga kerja) dan sumber daya non manusia (sarana, pra sarana, dan finansial)
3. Disposisi, harus dilakukan penyelarasan antara pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan dalam cara pandang pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, sehingga tujuan yang akan diraih dalam melaksanakan kebijakan dapat terwujud.
4. Struktur Birokrasi, setiap institusi dan organisasi yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah kota Bekasi, harus melaksanakan kebijakan yang ada sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.

Tabel 1. 2 Operasionalisasi Konsep Model George C. Edward III

Variabel Implementasi Kebijakan	Indikator
Komunikasi	a. Komunikasi antar pelaksana kebijakan; b. Sosialisasi pelaksanaan kebijakan.
Sumber Daya	a. Ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah; b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM);

Variabel Implementasi Kebijakan	Indikator
	c. Ketersediaan dana.
Disposisi	a. Adanya keselarasan pelaksanaan kebijakan antar aktor pelaksana kebijakan.
Struktur Birokrasi	a. Adanya struktur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan; b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai objek penelitian, Creswell (2007) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dengan studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti meneliti sebuah kasus atau berbagai kasus, dari waktu ke waktu secara rinci, dengan melakukan pengumpulan data secara mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi (observasi, wawancara, materi audiovisual, dokumen, dan laporan) dan melaporkan deskripsi kasus dan tema berbasis kasus (Creswell, Hanson, Plano, & Morales, 2007:245). Sehingga penelitian ini berusaha untuk dapat mengdeskripsikan suatu masalah secara lebih dalam menggunakan berbagai informasi yang ada, berdasarkan permasalahan yang ada pada studi kasus.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian yang menjadi wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan berada pada daerah Kota Bekasi tahun 2020 – 2024.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang diharapkan dapat menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
- b. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kota Bekasi
 1. Seksi Pengurangan Sampah
 2. Seksi Penanganan Sampah
 3. Seksi Limbah B3
- c. Unit Pengelola TPA Sumur Batu Kota Bekasi
- d. Masyarakat
- e. DPRD Kota Bekasi Komisi III Bidang Pembangunan
- f. LSM WALHI Jawa Barat

1.8.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer atau Sumber Primer menurut Sugiyono adalah sumber daya yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:225).

Oleh karena itu Data primer diperoleh peneliti melalui narasumber yang akan menjadi subjek penelitian, dengan melakukan studi lapangan secara langsung dan wawancara mendalam kepada narasumber.

2. Data Sekunder

Data Sekunder atau Sumber Sekunder menurut Sugiyono adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013:225). Oleh karena itu Data sekunder diperoleh oleh peneliti melalui studi pustaka dengan menggunakan dokumen atau data yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan menggunakan dokumen atau data yang berasal dari jurnal dalam bentuk online.

1.8.5 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan Interpretasi data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang dapat menggambarkan suatu keadaan secara tepat, dengan harapan dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada.

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan salah satu cara analisis dengan cara menggolongkan data dan membuang data yang tidak digunakan, sehingga dalam penganalisan data nantinya dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Sehingga apabila dalam penelitian nanti ditemukan data yang asing atau kurang relevan dengan penelitian, data tersebut akan direduksi atau dibuang (Prastowo, 2011).

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang ada untuk dapat melakukan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data yang dilakukan berupa teks naratif, dengan begitu peneliti dapat lebih mudah dalam memahami informasi yang ada (Prastowo, 2011).

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif ini adalah penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat sehingga kesimpulan yang dikemukakan valid dan konsisten. Penarikan kesimpulan ini juga dapat diletakkan sebagai penutup dalam penelitian (Prastowo, 2011).

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada enam rekomendasi menurut Yin (2003) yang dikutip oleh Creswell (2007), bahwa dalam pengumpulan data dengan studi kasus setidaknya ada enam jenis informasi yang perlu diperoleh yaitu dokumen, catatan arsip, wawancara, observasi langsung, dan artefak fisik (Creswell, Hanson, Plano, & Morales, 2007). Yang terkait dengan penelitian ini adalah dokumen, catatan arsip, wawancara, dan observasi secara langsung. Dengan begitu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara Mendalam

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan narasumber maupun pihak yang terkait dengan penelitian ini, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan B3 Kota Bekasi, dan Unit Pengelola TPA Sumur Batu Kota Bekasi.

b. Studi Kepustakaan

Peneliti memperoleh data sekunder yang berasal dari berbagai sumber dengan cara membaca dan mendalami dokumen, laporan, buku, dan jurnal berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan maksud mempertajam dalam menganalisis hasil penelitian.